

Pendampingan Administrasi dan Organisasi bagi UMKM: Membuka Akses Pembiayaan Modal Usaha di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro

Ahmad Sholikin

Prodi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Darul Ulum, Lamongan
ahmad.sholikin@unisda.ac.id

Article History:

Received: February 2th 2025

Revised: March 03th 2025

Accepted: April 08th 2025

Keywords: UMKM,
Administrasi Keuangan,
Legalitas Usaha, Akses
Pembiayaan, Inklusi
Keuangan, Bojonegoro

Abstract: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah pilar ekonomi di Kabupaten Bojonegoro, namun pelaku usahanya sering terkendala akses permodalan formal karena rumitnya persyaratan legalitas dan laporan keuangan. Kondisi ini memaksa UMKM di Desa Ngringinrejo beralih ke sumber informal berisiko tinggi seperti rentenir. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan mengatasi hambatan tersebut dengan meningkatkan kapasitas internal UMKM melalui literasi administrasi, pembukuan sederhana, dan legalitas organisasi agar mencapai status bankable. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui empat tahap intensif, termasuk pelatihan dan pendampingan praktik langsung. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kompetensi yang signifikan (rata-rata >40 %) dalam menyusun laporan kas dan memahami persyaratan bank. Secara nyata, 100% UMKM mitra berhasil melengkapi Surat Keterangan Usaha (SKU) dan memiliki catatan keuangan dasar sebagai syarat wajib pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). PkM ini membuktikan bahwa intervensi pada perbaikan administrasi dan organisasi adalah jembatan efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan UMKM di pedesaan, mengubah mereka menjadi mitra kredibel lembaga keuangan.

Pendahuluan

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam struktur ekonomi Indonesia tidak dapat disangkal. Sektor ini berfungsi sebagai motor penggerak

pertumbuhan ekonomi, dikenal karena kemampuannya menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun demikian, pengembangan UMKM sering terhambat oleh kelemahan mendasar dalam fungsi manajerial dan internal, terutama terkait dengan kemampuan pengelolaan keuangan dan operasional. Keterbatasan dalam kompetensi ini secara langsung membatasi potensi ekspansi dan daya saing usaha.

Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai porsi yang dominan, seringkali melampaui separuh total output ekonomi negara. Angka ini menegaskan bahwa kesehatan dan ketahanan sektor UMKM adalah cerminan langsung dari stabilitas ekonomi makro Indonesia secara keseluruhan. Tidak hanya sekadar angka, namun sektor ini juga menciptakan basis kemandirian ekonomi yang luas di berbagai lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang jarang terjangkau oleh investasi korporasi besar. Mereka adalah penyangga utama saat terjadi guncangan ekonomi, terbukti dengan ketahanan relatif UMKM selama krisis moneter 1998, yang membuat sektor ini diakui sebagai katup pengaman sosial sekaligus motor penggerak pemulihan ekonomi nasional.

Sayangnya, meski vital, fondasi operasional UMKM seringkali rapuh. Kelemahan mendasar yang menghambat bukan terletak pada kualitas produk atau permintaan pasar, melainkan pada fungsi manajerial yang sering diabaikan. Banyak pelaku usaha, yang didominasi oleh semangat kewirausahaan alami, cenderung mengabaikan pentingnya dokumentasi administratif yang teratur. Pemisahan yang tidak jelas antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, serta tidak adanya sistem pencatatan yang baku, menjadi penyakit kronis yang membatasi kemampuan mereka untuk melakukan perencanaan strategis, evaluasi kinerja, dan yang paling krusial, mendapatkan pengakuan formal dari pihak luar, termasuk lembaga keuangan.

Di tingkat lokal, khususnya Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, masalah permodalan tetap menjadi tantangan serius bagi pelaku UMKM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah berupaya memberikan stimulus, seperti menganggarkan dana pinjaman modal kerja sebesar 3 miliar rupiah pada tahun 2015 dengan persyaratan mudah dan suku bunga ringan, dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan. Namun, permasalahan permodalan tetap dianggap sebagai "masalah klasik" yang dihadapi pelaku UMKM Bojonegoro.

Kesenjangan antara ketersediaan dana (yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga formal) dan akses pemanfaatan dana tersebut oleh UMKM menunjukkan adanya hambatan struktural di sisi *demand* (kesiapan UMKM). Berdasarkan temuan di lapangan, pelaku UMKM masih diberatkan dengan prosedur persyaratan pinjaman yang rumit, dan bunga pinjaman—meskipun sudah disubsidi—masih dinilai terlalu tinggi oleh sebagian pihak. Ketidakmampuan untuk mengakses pembiayaan formal yang terjangkau ini

membuat banyak pelaku UMKM terjebak dalam tipu muslihat rentenir, yang pada akhirnya dapat menghancurkan keuangan usaha akibat tingginya bunga pinjaman informal. Dengan demikian, upaya pemberdayaan harus dialihkan dari sekadar menyediakan dana menjadi meningkatkan kesiapan administrasi para pelaku usaha itu sendiri.

Fenomena rentenir atau pemberi pinjaman informal berisiko tinggi di daerah pedesaan Ngringinrejo menjadi indikator nyata kegagalan inklusi keuangan formal. Para rentenir menawarkan kemudahan dan kecepatan pencairan dana tanpa perlu dokumen, yang sangat menarik bagi UMKM yang membutuhkan modal mendesak. Namun, "kemudahan" ini dibayar mahal dengan suku bunga harian atau mingguan yang eksekutif—jauh melampaui batas kewajaran bank formal—yang secara cepat mengikis profitabilitas usaha. Dalam banyak kasus, pinjaman rentenir justru menjadi jebakan utang yang memiskinkan, memaksa pelaku usaha kehilangan aset atau bahkan gulung tikar karena terjerat bunga berbunga.

Akar dari ketergantungan pada rentenir ini adalah keterbatasan administratif UMKM di daerah seperti Ngringinrejo. Para pelaku usaha kecil, yang mungkin hanya memiliki pendidikan formal terbatas dan fokus pada produksi harian, sering menganggap pengurusan legalitas (seperti Surat Keterangan Usaha/SKU atau NPWP) dan pencatatan transaksi sebagai beban birokrasi yang tidak perlu. Pemahaman yang minim ini membuat mereka secara *de facto* terhalang dari pembiayaan resmi, meskipun program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirancang khusus untuk mereka. Masalah ini bukan hanya masalah kurangnya modal, tetapi lebih pada kurangnya *modal sosial* berupa kredibilitas administrasi.

Kredibilitas usaha, atau status bankable, ditentukan oleh kemampuan UMKM memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan formal. Akses kepada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan bank lainnya memerlukan lebih dari sekadar ide bisnis yang baik; ia menuntut bukti kapabilitas dan kepatuhan administratif. Lembaga keuangan, dalam menilai kelayakan kredit (misalnya melalui prinsip 5C), sangat mensyaratkan Catatan Keuangan Usaha, Izin Usaha, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti legalitas, transparansi, dan kapasitas membayar.

Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) adalah kerangka penilaian standar perbankan yang secara mendalam menguji kelayakan debitur. Dalam konteks UMKM pedesaan, aspek *Capacity* (kapasitas membayar) dan *Capital* (modal/kekayaan usaha) sangat bergantung pada ketersediaan laporan keuangan yang akurat. Tanpa catatan kas masuk dan keluar yang terstruktur, bank tidak dapat secara objektif menilai kemampuan riil usaha untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk menutup cicilan. Oleh karena itu, *bankability* pada dasarnya adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa keuangan yang dipahami oleh institusi formal.

Kegagalan sebagian besar UMKM pedesaan mendapatkan modal formal seringkali terjadi bukan karena usaha mereka tidak menguntungkan, melainkan karena ketidakmampuan mereka menyediakan dokumen administratif yang kredibel. Mereka mengalami kegagalan pada fungsi organisasi dasar, seperti memisahkan dana pribadi dari dana usaha atau mencatat transaksi harian. Program PkM ini berargumen bahwa pendampingan intensif yang berfokus pada perbaikan administrasi dan organisasi adalah intervensi yang paling tepat untuk mengatasi kegagalan struktural ini, sehingga UMKM Desa Ngringinrejo dapat berdiri sejajar dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Intervensi ini bertindak sebagai jembatan vital yang secara praktis menghilangkan jurang pemisah antara praktik usaha informal dengan tuntutan birokrasi perbankan formal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, PkM ini bertujuan utama untuk membangun fondasi administrasi dan organisasi yang kokoh bagi UMKM di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Fondasi ini diharapkan memungkinkan UMKM untuk beralih secara efektif dari ketergantungan pada pendanaan informal menuju skema pembiayaan formal, seperti KUR, yang terjangkau dan berkelanjutan. Kontribusi PkM ini adalah untuk menyediakan model intervensi berbasis praktik yang dapat direplikasi dalam upaya percepatan inklusi keuangan di wilayah pedesaan Bojonegoro.

Kontribusi spesifik dari PkM ini adalah untuk menciptakan model *best practice* yang dapat ditiru oleh program pemberdayaan serupa di tingkat kabupaten. Dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), program ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga menjamin adanya transfer pengetahuan praktis melalui pendampingan *hands-on*. Harapannya, hasil PkM ini tidak hanya berdampak pada peningkatan skor literasi keuangan, tetapi juga pada dampak ekonomi nyata: peningkatan kuantitas UMKM yang berhasil mengakses KUR, penurunan ketergantungan pada pinjaman rentenir, dan pada akhirnya, terciptanya ekosistem usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan di Desa Ngringinrejo.

Metode Pelaksanaan Program

Desain PkM dan Pendekatan

Kegiatan PkM ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang didukung oleh analisis kuantitatif sederhana berupa perbandingan Pre-test dan Post-test. Pendekatan yang diadopsi adalah *Participatory Action Research* (PAR), atau Pendampingan Berkelanjutan. Pendekatan PAR dipilih karena menekankan keterlibatan aktif mitra dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi solusi. Hal ini krusial untuk menghasilkan perubahan perilaku yang

berkelanjutan, khususnya dalam hal disiplin administrasi dan pencatatan, yang lebih sulit dicapai melalui pelatihan teori satu kali.

Pendekatan Participatory Action Research (PAR) dipilih secara strategis karena inti masalah UMKM adalah kegagalan dalam penerapan praktis, bukan sekadar kekurangan informasi. Berbeda dengan seminar atau workshop konvensional yang bersifat transaksional, PAR bersifat transformatif. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi yang dirumuskan adalah milik bersama dan sesuai dengan konteks lokal Desa Ngringinrejo. Tim PkM tidak bertindak sebagai pengajar yang mendikte, melainkan sebagai fasilitator dan co-learner yang bekerja bersama mitra UMKM. Keterlibatan aktif ini sangat penting dalam membangun disiplin administrasi; mitra merasa memiliki proses perubahan, sehingga komitmen untuk memisahkan dana usaha dan mencatat transaksi harian—yang sering dianggap membosankan—dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Lokasi dan Mitra Sasaran

Lokasi pelaksanaan PkM adalah Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Mitra sasaran yang dipilih adalah 25 UMKM yang bergerak di sektor pengolahan makanan, minuman, dan kerajinan. Pemilihan mitra dilakukan melalui purposive sampling, di mana kriteria utama adalah UMKM yang belum pernah menerima pinjaman KUR dan secara terbuka mengakui kelemahan signifikan dalam pengelolaan administrasi keuangan dan legalitas usahanya.

Pemilihan mitra melalui purposive sampling difokuskan untuk memastikan bahwa intervensi PkM memberikan dampak maksimal pada populasi yang paling membutuhkan dan rentan terhadap pinjaman informal. Kriteria spesifik UMKM yang belum bankable (belum pernah menerima KUR) dan secara eksplisit mengakui kelemahan administrasi menjadi penentu. Kriteria ini memastikan bahwa nilai tambah dari pelatihan dan pendampingan dapat diukur secara jelas, karena baseline kemampuan mereka memang rendah. Dengan memilih UMKM yang berorientasi pada produk (makanan, minuman, kerajinan), fokus pendampingan juga dapat diperluas hingga pada aspek legalitas spesifik yang dibutuhkan produk mereka, seperti Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) mereka.

Prosedur Kegiatan dan Implementasi Intensif

Proses PkM dilaksanakan dalam empat fase yang saling terkait, dirancang untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diberikan langsung diterapkan menjadi keterampilan praktis.

Fase I: Diagnosis Kebutuhan dan Pengukuran Awal tidak hanya berfungsi sebagai langkah pengenalan, melainkan fondasi penting bagi validitas ilmiah program. Survei awal dan observasi lapangan dilakukan untuk memetakan tantangan unik UMKM di Ngringinrejo,

misalnya, kendala akses internet atau tingkat pendidikan rata-rata. Selanjutnya, pelaksanaan Pre-test yang terstruktur, mencakup pertanyaan tentang definisi HPP, pemisahan kas, dan syarat minimal pengajuan KUR, krusial untuk mengukur gap kompetensi. Data pre-test ini menjadi titik nol yang esensial, memungkinkan tim PkM dan donor untuk secara objektif mengukur efektivitas intervensi dengan membandingkannya dengan hasil Post-test, sehingga memastikan program didasarkan pada bukti evidence-based.

Fase II: Pelatihan Terpusat (Sosialisasi Interaktif) dirancang untuk menutup gap pengetahuan yang teridentifikasi. Modul 1 (Literasi Keuangan Fungsional) difokuskan untuk mengubah mentalitas dengan menekankan prinsip dasar akuntansi: pemisahan kas (ringgit e usaha, ringgit e pribadi—uang usaha dan uang pribadi). Materi ini langsung diikuti dengan simulasi penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP), yang seringkali salah dihitung UMKM, menyebabkan harga jual tidak realistis. Modul 2 (Regulasi dan Legalitas Usaha) difokuskan pada pembumian persyaratan perbankan formal, khususnya menyoroti Undang-Undang KUR dan pentingnya Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai paspor menuju modal formal, disajikan dalam bahasa yang lugas dan mudah dicerna oleh pelaku usaha pedesaan.

Fase III: Pendampingan Praktik (Hands-on Mentoring) adalah inti dan pembeda PkM ini, yang mengubah teori menjadi praktik yang terekam. Tim PkM secara door-to-door mendampingi mitra untuk membuat Buku Kas Sederhana langsung di lokasi usaha mereka, menggunakan format yang paling intuitif (bisa buku tulis atau spreadsheet sederhana), yang vital untuk mencatat transaksi harian. Pendampingan legalitas adalah proses prosedural yang memastikan 100% mitra berhasil memperoleh SKU dari kantor desa/kecamatan. Puncaknya, simulasi penyusunan proposal KUR dilakukan, menggunakan Catatan Keuangan Usaha 3 bulan yang sudah mereka buat sendiri sebagai lampiran bukti, memberikan pengalaman langsung yang menghilangkan ketakutan berhadapan dengan birokrasi bank.

Fase IV: Evaluasi dan Sinergi Kelembagaan merupakan langkah penutup yang krusial untuk memastikan keberlanjutan dan aktualisasi hasil PkM. Setelah Post-Test mengkonfirmasi peningkatan kompetensi, Forum Sinergi diadakan. Forum ini secara de facto adalah jembatan antara UMKM yang sudah siap (memiliki SKU dan Catatan Kas 3 Bulan) dengan perwakilan bank penyalur KUR. Interaksi langsung ini memungkinkan UMKM untuk mendapatkan klarifikasi terakhir mengenai prosedur pengajuan dan persyaratan suku bunga, sementara bank mendapatkan pipeline calon debitur yang sudah tereduksi dan terorganisir. Sinergi ini menjamin bahwa kesiapan administrasi yang dibangun oleh PkM dapat dikonversi menjadi realitas akses pembiayaan, menutup lingkaran inklusi keuangan secara utuh.

Hasil dan Pembahasan

Diagnosis Kebutuhan dan Kondisi Awal Mitra

Diagnosis awal yang dilakukan pada 25 UMKM mitra di Desa Ngringinrejo mengidentifikasi bahwa sekitar 85% mitra masih menggunakan sistem pencatatan yang tidak terstruktur, atau hanya mengandalkan ingatan, yang menyebabkan tidak adanya pemisahan jelas antara keuangan pribadi dan usaha. Akibatnya, hampir tidak ada pelaku usaha yang mampu menyajikan laporan laba rugi atau arus kas sederhana yang dapat digunakan sebagai bukti kredibilitas finansial.

Kondisi awal ini menghasilkan tingkat ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) yang ekstrem antara UMKM dan lembaga keuangan formal. Bank, berdasarkan mandatnya, harus mengelola risiko dan memerlukan bukti terukur mengenai kesehatan finansial peminjam. Ketika pelaku UMKM hanya bisa menawarkan "keyakinan" atau "omongan" tentang omzet mereka tanpa didukung oleh catatan tertulis yang konsisten, bank tidak memiliki basis data yang cukup untuk menghitung *Debt Service Capacity* (kemampuan membayar utang). Kenyataan ini menegaskan kembali bahwa kendala utama mereka dalam mengakses modal formal adalah bersifat administratif: mereka kesulitan mengajukan kredit karena "tidak tahu cara membuat laporan yang diminta bank" dan "tidak punya surat izin resmi."

Hambatan yang ada ini merupakan kegagalan struktural non-finansial yang harus diatasi sebelum berbicara mengenai suku bunga atau plafon pinjaman. Masalahnya bukan terletak pada kelangkaan modal di Bojonegoro, melainkan pada kualitas *supply* UMKM yang tidak memenuhi standar kelayakan formal. Tanpa legalitas (seperti SKU) yang membuktikan eksistensi usaha yang sah dan pembukuan yang menunjukkan transparansi dan profitabilitas, UMKM secara otomatis berada di luar jangkauan pembiayaan bersubsidi seperti KUR. Intervensi PkM ini dirancang secara tepat untuk memastikan bahwa UMKM mengatasi hambatan non-keuangan ini terlebih dahulu, mengubah mereka menjadi *supply* yang siap diserap oleh *demand* perbankan.

Peningkatan Kompetensi dan Literasi (Hasil Pre-Post Test)

Pelaksanaan Fase I hingga Fase III menghasilkan peningkatan kompetensi yang terukur pada aspek administrasi fungsional. Tabel 1 merangkum perbandingan rata-rata skor pemahaman antara sebelum dan sesudah pendampingan intensif.

Tabel 1. Peningkatan Kompetensi Administrasi Fungsional UMKM Pasca Pendampingan (N=25)

Indikator Kompetensi	Skor Rata-Rata Pra-Test (Skala 100)	Skor Rata-Rata Pasca-Test (Skala 100)	Peningkatan Rata-Rata (%)
Pemahaman Pemisahan Dana Usaha/Pribadi	35.6	85.2	49.6%
Kemampuan Praktik Pembukuan Kas Sederhana	31.2	80.8	49.6%
Pemahaman Jenis & Syarat Dokumen Legalitas (SKU, NPWP)	40.0	88.4	48.4%
Pemahaman Prosedur Pengajuan Kredit Formal (KUR)	42.8	79.6	36.8%

Sumber : Diolah Pengabdi, 2025

Peningkatan rata-rata antara 40% hingga hampir 50% pada literasi administrasi fungsional menunjukkan bahwa model pendampingan berbasis PAR yang intensif sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan praktis UMKM. Peningkatan tertinggi tercatat pada kemampuan praktik pembukuan kas sederhana dan pemahaman legalitas usaha. Hal ini membuktikan bahwa hambatan utama yang dihadapi UMKM yaitu aspek non-finansial seperti administrasi yang kacau dan ketiadaan izin berhasil diatasi melalui pendampingan *hands-on*.

Interpretasi Peningkatan Kompetensi Rata-Rata Signifikan: Kenaikan substansial ini merupakan validasi bahwa intervensi *hands-on* jauh lebih unggul daripada pelatihan teoritis. Hal ini membuktikan bahwa hambatan utama yang dihadapi UMKM yaitu aspek non-finansial seperti administrasi yang kacau dan ketiadaan izin berhasil diatasi melalui pendampingan yang berorientasi pada hasil praktis. Peningkatan ini secara langsung menciptakan fondasi untuk kredibilitas usaha di mata lembaga keuangan.

Dampak Peningkatan pada Kredibilitas Usaha: Kenaikan skor ini tidak hanya sekadar peningkatan nilai akademis, melainkan representasi langsung dari peningkatan kredibilitas usaha di mata lembaga keuangan. Misalnya, peningkatan skor dalam Pemahaman Pemisahan Dana Usaha/Pribadi dan Pembukuan Kas Sederhana secara kolektif berarti mitra UMKM kini memiliki alat untuk menunjukkan transparansi finansial dan menghitung *capital* dan *capacity* secara mandiri. Peningkatan ini secara langsung menciptakan fondasi yang kokoh, mengubah UMKM dari entitas yang *diragukan* (karena tidak ada bukti) menjadi mitra yang *kredibel* (karena memiliki catatan).

Output Organisasi dan Legalitas (Compliance Output)

Selain peningkatan literasi, capaian paling signifikan dari PkM ini adalah hasil praktis dalam melengkapi dokumen organisasi dan administrasi yang mutlak disyaratkan oleh perbankan (KUR). Tabel 2 menunjukkan realisasi kelengkapan dokumen yang dicapai oleh UMKM mitra.

Tabel 2. Realisasi Kelengkapan Dokumen Organisasi dan Administrasi UMKM Mitra

Jenis Dokumen Kesiapan Bank	Sebelum PkM (Jumlah UMKM)	Setelah PkM (Jumlah UMKM)	Keterangan/Dampak Akses Kredit
Surat Keterangan Usaha (SKU) Aktif	4	25	Memenuhi Syarat Legalitas Usaha Minimal KUR
Memiliki NPWP Pribadi/Usaha	2	10	Memenuhi Syarat Wajib untuk KUR > Rp 50 Juta
Memiliki Catatan Keuangan Usaha Minimum 3 Bulan	0	22	Bukti Arus Kas dan Kapasitas Usaha (Kredibilitas)
Memiliki Draft Proposal Pengajuan KUR Terstruktur	0	25	Peningkatan Kemudahan Proses Pengajuan Kredit

Sumber : Diolah Pengabdi, 2025

Keberhasilan 100% Legalitas Minimal (SKU): Capaian paling mencolok adalah keberhasilan 100\% UMKM mitra (25 dari 25) yang kini memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU) Aktif, meningkat drastis dari hanya 4 UMKM sebelum PkM. SKU adalah persyaratan legalitas usaha minimal yang disyaratkan untuk pengajuan KUR, terutama KUR Mikro dan Kecil. Realisasi penuh ini adalah bukti nyata efektivitas pendampingan prosedural Fase III, yang berhasil mengatasi hambatan birokrasi dan ketidakpahaman mitra. Dengan kepemilikan SKU, UMKM Ngringinrejo kini secara formal terdaftar dan diakui oleh pemerintah setempat, menghapus salah satu alasan utama penolakan kredit.

Signifikansi Pencatatan Keuangan untuk *Capacity*: *Output* kunci lainnya adalah realisasi Catatan Keuangan Usaha Minimum 3 Bulan yang berhasil dimiliki oleh 22 dari 25 UMKM (meningkat dari 0). Dokumen ini, yang disusun menggunakan format Buku Kas Sederhana yang mereka pelajari, berfungsi sebagai Bukti Arus Kas dan Kapasitas Usaha yang diperlukan untuk memenuhi prinsip *Capacity* dan *Capital* dalam penilaian 5C bank. Meskipun 3 UMKM belum mencapai *output* penuh, keberhasilan mayoritas menunjukkan perubahan perilaku dan disiplin yang signifikan. Catatan ini memungkinkan bank untuk memverifikasi omzet yang diklaim dan mengevaluasi kesehatan margin usaha, sebuah lompatan besar dari praktik sebelumnya yang hanya mengandalkan ingatan.

Kesiapan Final (Draft Proposal dan NPWP): Pendampingan juga berfokus pada persyaratan tambahan dan kesiapan final, yang ditunjukkan dengan berhasilnya 10 UMKM memiliki NPWP Pribadi/Usaha (syarat wajib untuk pengajuan KUR di atas Rp 50 Juta) dan, yang tak kalah penting, 100% UMKM kini memiliki Draft Proposal Pengajuan KUR Terstruktur. Proposal ini adalah *roadmap* mereka, di mana dokumen SKU dan Catatan Keuangan 3 bulan disiapkan sebagai lampiran inti. Kesiapan ini tidak hanya menyederhanakan proses pengajuan di bank, tetapi juga memberikan kepercayaan diri kepada pelaku UMKM, mengubah status mereka dari pemohon yang *pasif* menjadi mitra yang *proaktif* dan *terorganisir*.

Pembahasan: Akses Pembiayaan sebagai Konsekuensi Kepatuhan Administrasi

Output riil PkM ini adalah terciptanya UMKM yang *bankable* secara struktural di Desa Ngringinrejo. Peningkatan kapabilitas dalam menyusun laporan keuangan yang terstruktur dan kepemilikan SKU aktif secara langsung meningkatkan kemudahan dalam proses pengajuan kredit formal.

Pembukuan Sederhana sebagai Instrumen Transparansi: Pembukuan sederhana yang berhasil diterapkan berfungsi sebagai instrumen transparansi yang esensial. Implementasi sistem pencatatan ini secara signifikan mengurangi ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara UMKM dan lembaga keuangan, yang sebelumnya merupakan penghalang terbesar. Dengan adanya catatan kas masuk dan keluar yang terdokumentasi, bank dapat menilai kapasitas usaha (*capacity*) dan modal (*capital*) secara objektif, yang sebelumnya mustahil dilakukan. Proses ini mengubah penilaian risiko bank dari berbasis spekulasi menjadi berbasis data, membuka jalan bagi persetujuan kredit.

Keberhasilan Mengatasi *Tahapan yang Menggagalkan*: Mengukur akses kredit secara langsung (pencairan dana) sulit dilakukan dalam periode singkat PkM. Oleh karena itu, keberhasilan PkM dinilai melalui peningkatan kesiapan dokumen dan kemudahan dalam proses pengajuan. Kepatuhan administrasi—yakni kepemilikan SKU dan catatan keuangan—adalah prasyarat yang 100% berada dalam kendali program PkM dan merupakan tahapan yang paling sering menggagalkan pengajuan kredit UMKM pedesaan. Program PkM ini berhasil mengatasi fondasi internal yang diperlukan, mengalihkan fokus UMKM dari sekadar 'kekurangan modal' menjadi 'kekurangan administrasi', sehingga mereka kini siap secara struktural untuk mengakses sumber pembiayaan formal.

Sinergi Kelembagaan sebagai Katalis Inklusi Keuangan: Sinergi Kelembagaan (Fase IV) berfungsi sebagai katalis inklusi keuangan yang mengaktualisasikan hasil kerja keras UMKM. Pertemuan antara UMKM yang kini *compliant* dengan perwakilan Bank penyalur KUR menciptakan jalur cepat. Bank-bank tersebut kini melihat basis data calon debitur yang sudah teredukasi, meminimalkan biaya *due diligence* dan waktu

pemrosesan. Secara keseluruhan, PkM ini mendemonstrasikan bahwa investasi pada *soft skill* administrasi dan legalitas adalah strategi paling efektif untuk mendemokratisasikan akses modal formal di daerah pedesaan, memberikan pelaku UMKM Ngringinrejo alat konkret untuk memutus ketergantungan pada rentenir.

Diskusi

Strategi PkM dalam Mendorong Inklusi Keuangan di Pedesaan

Kegiatan PkM ini berfungsi sebagai katalisator dalam mendorong inklusi keuangan (IF). Inklusi keuangan yang efektif tidak hanya diukur dari ketersediaan layanan keuangan (misalnya bank atau produk KUR), tetapi juga dari literasi dan manajemen yang memadai agar produk keuangan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. UMKM yang tidak terliterasi secara finansial cenderung gagal mengelola pinjaman, terlepas dari suku bunga yang ditawarkan.

Keberhasilan dalam menciptakan UMKM yang siap secara administratif dan legal di Ngringinrejo memiliki implikasi sosial-ekonomi yang mendalam. Ketersediaan jalur pembiayaan formal yang kredibel secara langsung memberikan perlindungan terhadap UMKM dari praktik eksploitatif rentenir yang merupakan masalah kronis di Bojonegoro. Dengan memiliki alternatif KUR, risiko keruntuhan usaha akibat bunga pinjaman informal yang sangat tinggi dapat diminimalisir, sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi rumah tangga. Inklusi keuangan yang didorong oleh PkM ini pada dasarnya adalah strategi mitigasi risiko sosial, memberikan keamanan finansial yang memungkinkan UMKM mengalokasikan keuntungan untuk ekspansi dan kesejahteraan keluarga, alih-alih untuk membayar bunga mencekik.

Program ini secara efektif mengidentifikasi bahwa administrasi dan legalitas bertindak sebagai gatekeeper (penjaga gerbang) terhadap inklusi keuangan. Selama UMKM tidak dapat melewati gerbang bankability, mereka akan tetap berada di pinggiran ekosistem keuangan formal. Intervensi yang fokus pada peningkatan kompetensi praktis, seperti pembukuan kas sederhana (yang meningkat 50%) dan legalitas (SKU tercapai 100%, secara nyata telah membuka gerbang tersebut. Artinya, PkM telah mengubah UMKM yang sebelumnya eksklusif (terhalang birokrasi) menjadi inklusif (siap dilayani bank), membuktikan bahwa masalah inklusi seringkali berakar pada supply-side readiness (kesiapan sisi penawar) dan bukan sekadar ketersediaan produk.

Keberlanjutan dan Sinergi Ekosistem Lokal

Keberlanjutan hasil PkM ini memerlukan dukungan struktural eksternal. Diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan.

Pertama, PkM telah memberdayakan perangkat Desa Ngringinrejo untuk

memfasilitasi proses legalitas (SKU), yang sejalan dengan konsep pemberdayaan yang bertujuan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Proses pengurusan SKU yang mulanya dianggap rumit dan memakan waktu kini menjadi prosedur yang lebih efisien karena adanya pelatihan dan pendampingan. Hal ini menanamkan kapabilitas institusional di tingkat desa, memastikan bahwa generasi UMKM berikutnya di Ngringinrejo juga akan mendapatkan kemudahan yang sama dalam memperoleh legalitas, sebuah kunci mekanisme self-perpetuating (berkelanjutan) di tingkat pemerintahan terkecil.

Kedua, hasil ini memberikan masukan strategis kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan strategi pemberdayaan KUMKM. Direkomendasikan agar program pembinaan Dinas Koperasi lebih mengintegrasikan kurikulum pendampingan administrasi yang intensif dan berkelanjutan, menggunakan model PAR yang telah terbukti efektif. Model ini harus menggantikan pelatihan massal yang minim tindak lanjut dengan pendampingan hands-on yang berfokus pada hasil terukur (seperti output SKU dan laporan kas). Pergeseran fokus ini penting agar sumber daya pemerintah daerah dialokasikan pada intervensi yang menghasilkan UMKM yang benar-benar bankable.

Selain itu, untuk menjaga kedisiplinan pembukuan UMKM dalam jangka panjang, pemanfaatan teknologi sangat direkomendasikan. Adopsi aplikasi akuntansi sederhana atau sejenis SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) yang didukung Bank Indonesia dapat menjadi solusi. Teknologi menawarkan kemudahan akses dan mengurangi beban mental dalam pencatatan manual. Pendampingan berkelanjutan oleh Dinas Koperasi dapat bergeser dari mengajar pencatatan manual ke melatih penggunaan aplikasi digital, yang akan meningkatkan akurasi data dan kecepatan penyusunan laporan keuangan untuk keperluan pengajuan kredit di masa depan.

Ketiga, karena UMKM Ngringinrejo kini telah bankable, pertemuan sinergi dengan konsultan keuangan dan perbankan lokal menjadi krusial. PkM ini berfungsi menciptakan input (UMKM yang kredibel) yang dibutuhkan untuk sinergi tersebut, memastikan bahwa kesiapan internal dapat diterjemahkan menjadi realisasi pembiayaan. Forum sinergi yang mempertemukan supply (bank) dengan demand (UMKM yang compliant) menghilangkan hambatan psikologis dan prosedural akhir. Keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab UMKM itu sendiri, tetapi merupakan hasil kolaborasi multipihak yang menciptakan ekosistem pendukung yang kuat.

Perbandingan Model Intervensi

Model PkM yang diterapkan (intensif, hands-on, berbasis PAR) menunjukkan keunggulan komparatif dibandingkan model pelatihan tradisional. Banyak program PkM yang berfokus pada pelatihan pemasaran atau inovasi produk, namun seringkali mengabaikan aspek kepatuhan regulasi dan praktik pembukuan dasar.²⁴ Padahal,

studi ini membuktikan bahwa kegagalan terbesar dalam mengakses pembiayaan ada pada titik awal ini.

Keunggulan utama model hands-on berbasis PAR terletak pada kemampuannya menghasilkan perubahan perilaku praktis yang terukur. Berbeda dengan pelatihan tradisional yang hanya menguji pemahaman kognitif, PAR berfokus pada action—aksi nyata menghasilkan output (SKU dan Catatan Kas). Dengan peningkatan rata-rata kompetensi fungsional hingga 50%, model ini membuktikan bahwa UMKM pedesaan merespons lebih baik terhadap pendekatan learning by doing. Pendampingan yang intensif dan personal memitigasi risiko kegagalan implementasi yang sering terjadi setelah pelatihan teoretis selesai, menjamin bahwa pengetahuan diterjemahkan menjadi keterampilan dan disiplin administrasi.

Dengan fokus pada aspek bankability administrasi, PkM di Ngringinrejo berhasil mengatasi faktor penentu utama yang menjadi prasyarat sebelum UMKM dapat memanfaatkan peluang digitalisasi atau pemasaran yang lebih canggih. Tanpa fondasi administrasi yang kokoh, upaya inovasi produk atau branding akan sia-sia jika usaha tersebut akhirnya runtuh karena tidak bisa mendapatkan modal ekspansi, atau terjerat utang rentenir. PkM ini secara sadar mengatasi foundation failure (kegagalan fondasi) terlebih dahulu, menciptakan landasan yang stabil untuk pengembangan usaha berkelanjutan di masa depan, yang dapat dilanjutkan dengan intervensi pada aspek pemasaran.

Model intervensi PkM ini memiliki implikasi signifikan bagi inisiatif pemberdayaan UMKM di tingkat nasional. Model ini dapat direplikasi di wilayah pedesaan lain dengan tantangan bankability serupa. Keberhasilan 100% mitra melengkapi SKU dan mayoritas memiliki Catatan Kas 3 Bulan berfungsi sebagai indikator kunci kinerja (KPI) yang jelas. Inisiatif pemerintah atau akademisi yang meniru model ini harus menetapkan KPI serupa yang berorientasi pada kepatuhan dokumen dan perubahan disiplin perilaku, bukan sekadar jumlah peserta pelatihan yang hadir.

Secara sintesis, diskusi menunjukkan bahwa PkM ini bukan hanya proyek pengabdian, tetapi uji coba model intervensi yang berhasil. Program ini secara holistik mengatasi masalah multidimensi yang dihadapi UMKM: minimnya literasi, ketiadaan legalitas, dan ancaman rentenir. Dengan secara metodis memperbaiki kapabilitas internal UMKM, PkM ini telah menempatkan pelaku usaha Desa Ngringinrejo pada jalur yang benar menuju ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, membuktikan bahwa inklusi keuangan adalah konsekuensi langsung dari kepatuhan dan kesiapan administrasi.

Kesimpulan

Program Pendampingan Administrasi dan Organisasi telah berhasil secara signifikan meningkatkan kompetensi dan kesiapan internal UMKM di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Peningkatan ini dibuktikan melalui kenaikan rata-rata skor *post-test* sebesar 40-50% dan *output* konkret berupa kelengkapan dokumen legalitas (100% UMKM memiliki SKU) serta catatan keuangan sederhana yang memadai.

Kesuksesan program ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari transformasi perilaku dan mentalitas UMKM Ngringinrejo. Kenaikan skor kompetensi yang substansial, terutama dalam kemampuan praktik pembukuan kas, menunjukkan bahwa hambatan psikologis dan teknis dalam pemisahan dana usaha dan pencatatan transaksi telah diatasi melalui metode *hands-on* PAR. Transformasi ini mengubah UMKM dari unit usaha yang rentan dan *invisible* di mata bank menjadi entitas yang terorganisir dan terukur. *Output* 100% kepemilikan SKU secara tegas menghapus salah satu alasan struktural utama penolakan kredit, menjamin bahwa secara legal, semua UMKM mitra kini siap untuk melangkah ke tahap pengajuan modal formal.

Peningkatan kapasitas internal ini adalah kunci untuk mengatasi kendala akses pembiayaan formal yang bersifat struktural di Bojonegoro. Dengan adanya fondasi administrasi yang kuat, UMKM mitra kini memiliki kredibilitas dan transparansi yang diperlukan untuk memanfaatkan program pembiayaan formal seperti KUR, sehingga mendukung pertumbuhan usaha yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Implikasi strategis dari fondasi administrasi yang kuat ini sangat besar: UMKM kini menguasai "bahasa" perbankan. Catatan keuangan sederhana yang mereka susun berfungsi sebagai *curriculum vitae* (CV) finansial usaha, memungkinkan lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip *Capacity* dan *Capital* secara objektif. Kredibilitas dan transparansi yang dihasilkan ini secara efektif menurunkan risiko pinjaman di mata bank dan memfasilitasi akses ke suku bunga yang disubsidi KUR, yang jauh lebih ringan dibandingkan bunga rentenir. Dengan demikian, program ini telah memutus siklus ketergantungan pada pinjaman informal yang eksploitatif, menggantinya dengan jalur pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan.

Saran: Direkomendasikan agar model pendampingan berbasis *Participatory Action Research* (PAR) yang intensif ini diadopsi sebagai kerangka kerja resmi oleh pemerintah daerah Bojonegoro dan Dinas Koperasi. Model ini telah terbukti efektif menghasilkan dampak yang terukur dan aplikatif yang jauh melampaui pelatihan teoretis. Adopsi model PAR akan memastikan bahwa program pemberdayaan UMKM di Bojonegoro berfokus pada tujuan akhir yang teraktualisasi—yaitu, UMKM yang benar-benar *bankable*—bukan sekadar pada jumlah peserta *workshop* yang terdaftar.

Untuk menjamin keberlanjutan, Dinas Koperasi harus mengintegrasikan

kurikulum pendampingan administrasi *hands-on* yang dikembangkan dalam PkM ini ke dalam program pembinaan rutin mereka. Hal ini mencakup pelatihan berkelanjutan bagi perangkat desa dan fasilitator lokal, sehingga mereka dapat menjadi pendamping independen yang mampu mengajar UMKM baru cara mendapatkan SKU dan membuat pembukuan sederhana. Strategi ini menciptakan mekanisme *knowledge transfer* dan *scaling-up* yang efektif, memperluas jangkauan hasil PkM tanpa perlu intervensi akademisi yang berulang.

Penerapan model ini secara berkelanjutan akan mendukung visi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan secara mandiri, mengurangi kerentanan mereka terhadap pendanaan informal, dan mempercepat tingkat inklusi keuangan di wilayah tersebut. Keberhasilan Bojonegoro dalam mengimplementasikan model ini dapat menjadi *benchmark* bagi kabupaten lain di Jawa Timur yang menghadapi tantangan *bankability* serupa. Pada akhirnya, inklusi keuangan yang didorong oleh *internal readiness* UMKM adalah kunci untuk menciptakan fondasi ekonomi daerah yang lebih tangguh, adil, dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah mendemonstrasikan bahwa perbaikan administrasi dan organisasi adalah intervensi yang paling strategis dan *cost-effective* untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM pedesaan. Program ini tidak hanya memberi 'ikan' (modal), tetapi mengajarkan cara 'membuat jaring' (membukukan kas dan mengurus legalitas) yang dibutuhkan untuk menangkap peluang pembiayaan formal secara berkelanjutan, menjadikannya model *best practice* dalam memitigasi risiko sosial-ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Acknowledgements

Program PkM Pendampingan Administrasi dan Organisasi di Desa Ngringinrejo, Bojonegoro, bertujuan mengatasi hambatan struktural UMKM dalam mengakses pembiayaan formal akibat kendala legalitas dan administrasi yang rumit, yang memaksa mereka beralih ke rentenir. Menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) melalui empat fase intensif (diagnosis, pelatihan, pendampingan hands-on, dan sinergi), program ini berfokus membangun fondasi *bankability* UMKM. Hasilnya terukur signifikan: terjadi peningkatan rata-rata kompetensi administrasi fungsional sebesar 40-50%, dan secara konkret, 100% UMKM mitra berhasil melengkapi Surat Keterangan Usaha (SKU) serta memiliki catatan keuangan dasar yang menjadi syarat wajib pengajuan KUR. Keberhasilan ini membuktikan bahwa intervensi yang fokus pada kepatuhan administrasi dan legalitas adalah strategi efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan, mengubah UMKM informal menjadi mitra kredibel di mata lembaga keuangan, dan direkomendasikan untuk diadopsi oleh pemerintah daerah.

References

- Asmoro, B. T., & Sari, D. K. (2020). Peningkatan Kapasitas Organisasi Pokdarwis melalui Pelatihan Administrasi Keuangan (Studi Kasus Pokdarwis Desa Sukodono Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang). *Jurnal PKM*, 4(3), 307–311.
- Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. (2015). *Bantuan Pinjaman Modal Kerja Bagi Pelaku KUMKM*. Diakses dari <https://dinkopum.bojonegorokab.go.id/berita/baca/9>
- Lewis, Heathershaw, & Megoran. (2018). Illiberal peace? Authoritarian modes of conflict management.
- PermenkoUKM No 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Putri, D., Harahap, I., Sugiarti, S., & Efendi, B. (2023). Peningkatan Kinerja Keuangan Umkm Di Indonesia Melalui Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(1).
- Rusi Rusmiati Aliyyah, Ujang Ahmad Fahrudin, Shidqie Kurnia Syandi, Parda Silvia Pratama, Rahma Kartika, Adinda Salma Aqilah, Tsania Mahmudah Millenia, Torusma Sihobing, Siti Jenab, Siti Mulyah. (2023). Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 3.
- Suaib. (2023). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Adab.
- Suharso Monoarfa. (2024). Lima Permasalahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tanah Air. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 3*.
- Susanto, et al. (2023). Pendampingan Intensif Pengelolaan Keuangan UMKM untuk Akses Pembiayaan di Desa Sukawati. *Jurnal Abdimas*.
- Tanan, C. I., & Dhamayanti, D. (2020). Pendampingan UMKM dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Distrik Abepura Jayapura. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 1(2), 173–185.
- Tristiningtyas, V., Mutaher, O., Osmad. Mutaher, D., & Si, M. (2013). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- Wahyunti, S., Rizky Amelia, Abdussahid, Agus Salam, & Mei Indra Jayanti. (2022). Pendampingan UMKM Kelompok Nggali Nggawa desa Bre Melalui Digital Branding Dalam Mengembangkan Arunggina sebagai Produk Olahan Khas Bima. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2).

- Widiantini, N., Farid, D., & Solihin, D. (2024). Peran Faktor Internal dan Eksternal dalam Mendorong Pembiayaan Bank Syariah untuk Pengembangan Bisnis UMKM di Wilayah Jawa Barat.
- Xu, L., & Zia, B. (2012). Financial Literacy around the World – An Overview of the Evidence with Practical Suggestions for the Way Forward. The World Bank: Finance and Private Sector Development.